

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Abdullah, Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amanulloh, Naeni, 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arsyad, Idham. 2015. *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ghozali, Dindin. 2015. *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Huda, Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa “ Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi”*. Malang : Setara Press.
- Ihsan, Moch. 2015. *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Maryunani, 2002. *Alokasi Dana Desa*. Brawijaya University Press: PT Dinar Wijaya.

- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Resda karya.
- Mustakim, Mochammad. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyeenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putra, Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, dkk. 2004. *Perekayasan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjaja, Haw, 2003. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan upuh*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- _____, Haw, 2003. *Pemerintah Desa/ Marga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, Haw, 2005. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UUNo. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yunita, Sri, 2016. *Metodologi Penelitian*. Laboratorium PPKn Fakultas Ilmu Sosial: Unimed.

Sumber Jurnal:

- Hanifah, Suci. (2015). “ Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)” dalam “ *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*” volume 4 No. 8, 2015.
- Husna, dkk. (2016). “ Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMEKA)*. Vol. 01, No. 1, 2016.

Ismail, dkk. (2016). “ Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dalam “*Jurnal Ekonomi dan Bisnis*” volume XIX No. 2 Agustus, 2016.

Kartika, Ray. (2015). “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” dalam “*Jurnal Bisnis*” volume 3 No. 1, 2015.

Undang- Undang / Peraturan:

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.